



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN  
2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk membuka peluang bagi tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu dan dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Keputusan ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. **Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001** tentang **Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.

Pasal I

**Keputusan Presiden Nomer 103 Tahun 2001** tentang **Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. **Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;**
- b. **Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;**
- c. **Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;**
- d. **Keputusan Presiden Nomer 9 Tahun 2004;**
- e. **Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;**

f. **Peraturan ....**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; dan
- g. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10),  
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

- (1) Kepala LPNK adalah jabatan negeri.
- (2) Khusus Kepala pada:
  - a. Badan Standardisasi Nasional;
  - b. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - c. Lembaga Sandi Negara; dan
  - d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

4

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta**

pada tanggal 18 Desember 2015

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ltd.

**JOKO WIDODO**

**Diundangkan di Jakarta**

pada tanggal 28 Desember 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ltd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 322**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KABINET RI**

**Divisi Bidang Politik, HUKUM,  
Keamanan,**



**Wansyah Lubis**